

UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM

**Skripsi Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum
Semester Genap 2018**

**Efektivitas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Terhadap Pemberantasan
Pungutan Liar di Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
(Studi Penelitian Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Batam)**

NPM: 1451091

MUHLIS

Abstrak

Praktik pungutan liar adalah permasalahan serius didalam suatu instansi pelayanan publik yang menyebabkan rusaknya sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu adanya upaya pemberantasan yang secara tegas, terpadu, dan efisien sehingga dapat menimbulkan efek jera, sehingga melalui peraturan presiden nomor 87 tahun 2016 dibentuklah satuan tugas sapu bersih pungutan liar.

Melihat efektivitas hukum satuan tugas telah melaksanakan tugas pemberantasan pungutan liar di kepulauan riau berupa penegakan hukum terhadap kasus pungli di instansi pelayanan publik yang melakukan penyalahgunaan wewenang. Peran satuan tugas menegakkan hukum melalui sinergitas dan pemanfaatan personil yang terdiri dari 4 unit fungsi: unit inteljen, unit pencegahan, unit penindakan dan unit yustisi. Unit yang dibentuk mempunyai peran penting dalam satuan tugas.

Di kota batam, melalui unit satuan tugas terus melakukan upaya pencegahan sampai pada penindakan, akan tetapi pelaksanaan di lapangan masih menemui kendala-kendala internal dan external dalam tubuh saber pungli di antara salah satu kendala adalah faktor lintas intansi dalam susunan organisasi satuan tugas.

Kata Kunci: pungutan liar, penegakan, satuan tugas.